



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN**

Jln. Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telepon. (0641) 425139 Faksimili. (0641) 425129 Surel : info@iainlangsa.ac.id
Website : <http://iainlangsa.ac.id>

**Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Pengangguran dan
Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh**

Aida Shafira¹, Muhammad Dayan² dan Ade Fadilah FW Pospos³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa
Email: aidashafira@gmail.com

Abstract

Poverty is a problem for the country and for regions in Indonesia, including the province of Aceh. It is also known from the news that Aceh is a poor area on the island of Sumatra. The government is trying to reduce the percentage of poverty by pursuing development through government programs using the Aceh Revenue and Expenditure Budget. In addition, the unemployment rate of the community also has an impact on poverty because they have no income. Likewise with inflation, if there is an increase, it will have an impact on decreasing people's purchasing power and can be a cause of poverty. This research was conducted with the aim of knowing the effect of APBD, unemployment and inflation on poverty in Aceh Province. The data used are secondary data in the form of APBD, unemployment and inflation and poverty for 2006-2020 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance and the Central Statistics Agency for Aceh. Data analysis used multiple linear regression, t test and F test and the coefficient of determination (R²) test. The results showed that the Regional Revenue and Expenditure Budget had a negative and significant effect on poverty. Unemployment and inflation have a positive and insignificant effect on poverty. As much as 88.8% of the Regional Revenue and Expenditure Budget, unemployment and inflation can explain the poverty variable in Aceh Province.

Keywords: APBD, Unemployment, Inflation and Poverty

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan pembangunan salah satunya pengentasan kemiskinan. Tujuan menilai efektivitas merupakan fundamental dan menjadi sebuah alat ukur untuk penilaian berbagai jenis program pembangunan. Pemerintah baik pusat dan daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan (Bappenas, 2021). Kebijakan

dan program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan kemiskinan secara tuntas (Telasari, 2017). Kemiskinan merupakan masalah bagi negara terutama pemerintah

yang sedang berkuasa belum mampu untuk memberi kesejahteraan pada setiap lapisan masyarakat. Maka pemerintah perlu melakukan perhatian mengenai kemiskinan setiap tahun. Kemiskinan menjadi permasalahan bagi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kemiskinan dan implikasi permasalahannya melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, dan sering kali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk manusia yang bersangkutan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering sekali tidak disadari kehadirannya oleh manusia yang bersangkutan (Suliswanto, 2014). Bagi pemerintah daerah kemiskinan juga merupakan permasalahan, dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung fasilitas (baik fisik seperti jalan, pelayanan kesehatan maupun non fisik berupa penyuluhan ekonomi, kesehatan, keamanan) untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerahnya. Pemimpin daerah baik provinsi, kabupaten dan kota semua mengupayakan agar masyarakatnya sejahtera dan kemiskinan terus dipangkas keberadaannya. Apabila kemiskinan tidak berkurang jumlah atau persentasenya, ada anggapan pemerintah tidak memperhatikan rakyat di daerahnya dan apabila masalah kemiskinan juga berdampak pada masalah yang kompleks seperti adanya kriminalitas (pencurian), pendidikan dapat menurun, kesehatan juga menurun dan tidak adanya rasa aman bagi masyarakat. 3 Kemiskinan telah memangkas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan mendapatkan semua kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Persoalan kemiskinan mempunyai dua dimensi seperti dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan perkapita masyarakat dan perekonomian di suatu negara,

sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin (Kurniawan, 2018). Gini rasio tahun 2017 sebesar 32,9%, tahun 2018 32,5%, tahun 2019 sebesar 31,9% dan terjadi peningkatan tahun 2020 menjadi sebesar 32,3%. Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan fundamental sehingga dapat menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif jenis asosiatif yang merupakan penelitian berdasarkan falsafah positivisme yaitu ilmu yang valid, konkrit, objektif, teramati, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2012). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka, lalu diolah dengan rumus statistik tertentu, dan diinterpretasikan dalam rangka menguji hipotesis yang telah disiapkan lebih dahulu, serta lazim bertujuan mencari sebab akibat sesuatu. penelitian kuantitatif cenderung meneliti lebih dari satu variabel (Sukidin dan Mundir, 2015). Penelitian ini bersifat asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sujarweni, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, pengangguran, inflasi dan kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2006 sampai dengan 2020, yang dapat diakses melalui www.aceh.bps.go.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan data berupa investasi, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Data tersebut diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Data dapat di lihat rata-

rata (mean), nilai tertinggi, nilai terendah dan juga standar deviasi

Tabel 1 Statistik deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|--------|----------------|
| LogAPBA | 15 | 6,50 | 7,19 | 6,9574 | ,20484 |
| LogPengangguran | 15 | ,79 | 1,02 | ,9172 | ,08096 |
| LogInflasi | 15 | -,66 | 1,08 | ,5646 | ,44039 |
| LogKemiskinan | 15 | 1,18 | 1,45 | 1,2819 | ,08481 |
| Valid N (listwise) | 15 | | | | |

Sumber : Data Sekunder Penelitian, diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui nilai n atau jumlah data dari masing-masing variabel adalah 15. 15 data untuk Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (X1) nilai minimum sebesar 6,50, nilai maksimum sebesar 7,19, dari periode 2006-2020 diketahui nilai mean 15 sebesar 6,9574, serta nilai standar deviasi sebesar 0,20484 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Pengangguran (X2) dari 15 data diketahui bahwa nilai minimum sebesar 0,79 nilai maksimum sebesar 1,02 nilai mean dari periode 2006-2020 sebesar 0,9172 serta nilai standar deviasi sebesar 0,08096 artinya nilai mean pengangguran periode 2006-2020 lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Inflasi (X3) dari 15 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar -0,66 yang nilai maksimum sebesar 1,08, nilai mean dari periode 2006-2020 sebesar 0,5646, serta nilai standar deviasi sebesar 0,44039 artinya nilai mean periode 2006-2020 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah atau maka penyebaran nilainya merata. Kemiskinan (Y) diketahui bahwa nilai minimum sebesar 1,18 yang nilai maksimum sebesar 1,45, nilai mean dari periode 2006-2020 sebesar 1,2819, serta nilai standar deviasi sebesar 0,08481 artinya nilai

mean periode 2006-2020 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Berdasarkan data penelitian yang terdiri dari variabel bebas (APBA, pengangguran dan inflasi) serta variabel terikat kemiskinan. Data yang digunakan pada penelitian ini sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Data-data penelitian hanya APBA yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hanya tahun 2007 menurun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan melalui belanja Aceh.

Pembahasan

Pengaruh APBA terhadap Kemiskinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh berdasarkan hasil penelitian dengan nilai t hitung $-6,907 > -20,20099$ dan $t \text{ sig} < \alpha 5\% (0,000 < 0,05)$ Ho ditolak dan Ha diterima, dapat dinyatakan secara parsial APBA memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut karena semakin besar nilai APBA maka banyak kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana umum berupa jalan, pemberian bantuan usaha, memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian nilai anggaran pendapatan dan belanja Aceh yang meningkat setiap tahunnya (berdasarkan data penelitian 2006-2020) terkecuali tahun 2007. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan atas penggunaan pendapatan untuk belanja provinsi baik untuk program fisik sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat umum maupun belanja untuk program non fisik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penyuluhan-penyuluhan (ekonomi, pertanian, perikanan, perkebunan dan juga kehidupan sosial). Adanya pembangunan fisik dan non fisik diharapkan dapat mengembangkan

perekonomian dan menurunkan kemiskinan di Aceh. Pengaruh APBA terhadap kemiskinan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah dalam APBD mencerminkan kebijakan pemerintahan suatu daerah. Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi, serta peningkatan pendapatan per kapita (Suparmoko, 2004). dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Debby, Rotinsulu dan Luciana, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t, t hitung $-6,907 > -2,20099$ dan t sig $< \alpha 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Hasil penelitian juga diketahui untuk pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t dengan perolehan nilai t hitung $< t$ tabel ($0,796 < 2,20099$) dan t sig $> \alpha 5\%$ ($0,443 > 0,05$). Hasil penelitian diketahui untuk inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t, t hitung $< t$ tabel ($0,620 < 2,20099$) dan t sig $> \alpha 5\%$ ($0,548 > 0,05$). Hasil penelitian diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji F dengan nilai F hitung $> F$ tabel ($37,948 > 3,59$) dan nilai F sig $< \alpha 5\%$ ($0,000 < 0,05$).

Saran

Kemiskinan menurut data dari BPS berfluktuasi sejak tahun 2006-2020, harapannya kemiskinan di Aceh menurun, sehingga pada akhirnya angka kemiskinan 0%, untuk itu pemerintah perlu terus mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program seperti rumah bantuan, air bersih, dan modal usaha. Kemudian melalui hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kemiskinan di Provinsi Aceh yang dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Pengangguran dan inflasi. Serta bagi pemerintah Aceh dengan informasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan mengenai kemiskinan di Provinsi Aceh berkaitan dengan APBA, tingkat pengangguran dan juga inflasi Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjut yang ingin meneliti kemiskinan di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhammad, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- <https://www.pahamindonesia.org/gaji-di-bawah-upah-minimum-karena-bergantungpendapatan-perusahaan/> diunduh 25 Oktober 2021
- Ihsan Khairil dan Ikhsan, Analisis Pengaruh UMP, inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 3 No 3, 2018
- Imelia, Pengaruh inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi, (Jurnal Paradigma Ekonomi, Vol 1, No 5, 2012
- Indriantoro Nur dan Supomo, Bambang, Metode Penelitian, Yogyakarta: BPFE, 2014

- Karim, Adiwarman A, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Kuncoro Mudarajad, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, UPP YKPN, 2010
- Kurniawan, Acep. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018
- Machmud, Amir, Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Erlangga, 2016
- Mankiw Gregori N, Makro Ekonomi, Jakarta: Erlangga, 2016
- Masyhuri Machfudz, M. Nurhadi Sujoni, Teori Ekonomi Makro, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Mukarramah, Cindy Yolanda, & Muhammad Zulkarnain. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 105-117.
<https://doi.org/10.0123/jse.v3i2.1885>
- Peraturan Pemerintah, PP No 78 tahun 2015 tentang upah minimum provinsi
- Rahardja Prathama dan Manurung Mandala, Teori Ekonomi Makro, Jakarta: LPP FE UI, 2012
- Retnowati Diah dan Harsuti, Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3, No 2, 2017
- Rukmanasari, Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021
- Santoso, Tri Wibowo Budi & Susilo Hadi, Ekonomi Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Sembiring, Intan Permata Sari Br, Simanjuntak Surtama dan Sitepu, Vini Alvionita Br, Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara 24 tahun 2006-2020, *Jurnal Ilmu Sosioal, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol 2, No 2, 2021
- Sirusa BPS, <http://sirusa.bps.go.id/indeks.php?=&indikator/wiew&id=44,2021>
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Jakarta: Rineka Cipta, 2016
- Sujarweni, V. Wiratna, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Sukidin dan Mundir, Metodologi Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan, Surabaya: Insan Cendekia, 2015
- Sukirno Sadono, Makro Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Suliswanto, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: Andi, 2014
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
- Telasari Melistika Indriana, Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia, Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2017